

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi di perkotaan Indonesia. Secara umum, permukiman kumuh diartikan sebagai lingkungan hunian yang tidak layak huni karena bangunan yang tidak beraturan, kepadatan bangunan, fasilitas, dan infrastruktur yang tidak memenuhi standar kesehatan. Menurut Drakakis-Smith (1980) permukiman kumuh didefinisikan sebagai kawasan hunian, dengan kondisi fisik lingkungan fisik yang buruk, lahan yang sangat terbatas, serta minimnya fasilitas penunjang kehidupan masyarakat.

Adapun Grimes (1976) berpendapat bahwa permukiman kumuh merupakan suatu keadaan, yang secara fisik kondisi lingkungannya yang buruk, bentuk rumah yang kecil, kualitas lingkungan yang rendah, serta minimnya fasilitas umum. Kedua pendapat tersebut menjelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan kawasan huni yang tidak memenuhi standar kelayakan. Roitman & Rukmana (2022) menjelaskan keberhasilan penanganannya bergantung pada pemahaman cara hidup dan ketahanan yang sudah dibangun masyarakat secara turun-temurun. Permukiman kumuh merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni di mana kondisi tidak memenuhi persyaratan hunian baik secara teknis maupun non teknis.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pasal 1 ayat (13), permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Lebih dari sekadar masalah fisik, permukiman kumuh mencerminkan akumulasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di kawasan ini sering dijumpai kondisi kemiskinan struktural, akses terbatas terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan, serta lemahnya pengelolaan lingkungan. (Simarmata dkk, 2024) kesadaran terhadap lingkungan yang rendah dan partisipasi sosial yang terbatas semakin memperparah kualitas ruang hidup serta menghambat upaya perbaikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu Saputra et.al (2022) menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari wilayah permukiman kumuh yaitu dampak fisik dan dampak sosial, dampak fisik terlihat dari kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan, drainase tersumbat, dan kualitas air yang menurun, yang pada gilirannya memicu penyebaran penyakit menular. Sementara itu sejalan dengan pendapat Ramadhan & Wijaya (2022) kesenjangan akses ekonomi dan terbatasnya peluang penghasilan menjadi pemicu utama munculnya berbagai masalah sosial di kawasan permukiman kumuh. Tekanan kebutuhan hidup yang tinggi namun tidak diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan yang layak sering mendorong warga, terutama kalangan remaja, melakukan perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kriminalitas sebagai jalan keluar sementara. Kondisi ini kerap disertai munculnya masalah sosial lain seperti

kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan ketidakstabilan sosial (Sukmaniar dkk., 2021). Banyaknya terjadi kriminalitas, hal ini karena ekonomi yang rendah juga mengakibatkan masyarakat melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, premanisme adalah bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di permukiman kumuh.

Manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan sandang, pangan, dan hunian yang layak, sebagai hak asasi yang mendasar. Setiap individu memiliki hak asasi untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sehingga aktivitas manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan lingkungan tempat ia tinggal sekitarnya (Soekanto 2012).

Akan tetapi dalam proses pemenuhan kebutuhan tidak semua manusia memiliki kemampuan yang sama untuk mewujudkan kehidupan yang layak. Sebab adanya keterbatasan terhadap sumber daya, terutama pada masalah permukiman. Permukiman merupakan kawasan yang menjadi tempat untuk bermukim ataupun tempat tinggal oleh masyarakat (UU No. 1 Tahun 2011). Menurut Rahardjo & Adisasmita (2010), Permukiman adalah kesatuan lingkungan fisik yang terdiri dari kelompok bangunan tempat tinggal beserta fasilitas umum, sarana sosial, dan prasarana lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Dalam perkembangannya, dinamika kehidupan perkotaan sering menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama dalam penyediaan lahan dan infrastruktur sanitasi yang layak.

Kota sebagai ruang yang terbuka terhadap pengaruh luar, mengalami perubahan sosial yang jauh lebih cepat dibandingkan wilayah pedesaan. Perubahan ini terlihat dari pergeseran pola interaksi, nilai, norma, dan cara hidup masyarakat sehari-hari serta perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Martono, 2021). Namun, pertumbuhan tidak selalu berjalan secara merata, ketimpangan ruang dan akses sumber daya menjadi akar munculnya permukiman kumuh sebagai wujud masalah sosial perkotaan (Pratama & Lestari, 2021).

Menurut Tjuk Kuswartojo (2005), ciri-ciri wilayah permukiman kumuh yaitu padat, memiliki kualitas konstruksi rendah, serta prasarana pelayanan lingkungan yang minim. Hal ini diperkuat oleh Rudiyanono (2000) menyatakan dua standar permukiman kumuh yaitu

- a) Dilihat dari keadaan struktur rumahnya, pemisah fungsi ruang kepadatan hunian, rumah dan bangunan.
- b) Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan seperti air bersih, sanitasi dan ketersediaan infrastruktur lainnya.

Tantangan ini semakin berat mengingat kawasan permukiman kumuh secara konsisten diidentifikasi sebagai kawasan yang mengalami krisis akses air bersih (UN-Habitat, 2020). Di wilayah pesisir, kondisi ini diperparah oleh resiko banjir rob dan kenaikan muka air laut yang berulang. Dalam kondisi kerentanan tersebut, masyarakat dituntut memiliki kemampuan bertahan, beradaptasi, serta bangkit kembali menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kemampuan bertahan hidup kelompok masyarakat urban yang terpinggirkan, seperti komunitas manusia gerobak, sangat bergantung pada

kekuatan jaringan sosial dan adaptasi kolektif. Kelompok marjinal ini memanfaatkan relasi antar sesama untuk berbagi informasi wilayah potensi rongsokan sekaligus membangun mekanisme solidaritas sosial guna menghadapi krisis ekonomi di perkotaan (Bahtiar dkk., 2025). Masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi. Adaptasi dapat dimaknai sebagai kemampuan individu maupun kelompok masyarakat untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali dalam menghadapi tekanan, risiko, serta ketidakpastian sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menurut Budiyono & Setiawan (2021) permukiman kumuh bukan hanya ketahanan fisik, melainkan kemampuan mengorganisir diri, memanfaatkan sumber daya terbatas, dan membangun strategi penyesuaian jangka panjang. Berdasarkan indikator Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018, faktor penyebab kekumuhan dapat dilihat dari kondisi fisik bangunan. Beberapa di antaranya yaitu rumah tidak layak huni, kepadatan bangunan tinggi, serta kondisi jalan lingkungan yang sempit, tidak teratur, atau tidak memiliki akses memadai. Hal ini memperburuk kualitas tempat tinggal dan penyediaan sarana prasarana.

Tanjungpinang sebagai salah satu kota permukiman kumuh yang dikategorikan wilayah kawasan kumuh seluas 147,90 hektar yang tersebar di tiga kecamatan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 337 Tahun 2024. Ketiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Tabel 1.1 Daftar Wilayah Permukiman Kumuh

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
1.	Bukit Bestari	5	Dompak, Sei Jang, Tanjung Ayun Sakti, Tanjungpinang Timur dan Tanjung Unggat.
2	Tanjungpinang Barat	4	Bukit Cermin, Kampung Baru, Kamboja dan Tanjungpinang Barat.
3	Tanjungpinang Kota	4	Kampung Bugis, Penyengat, Senggarang dan Tanjungpinang kota.

Sumber : Keputusan Wali Kota Tanjungpinang 2024.

Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, menjadi salah satu kawasan kumuh dengan kategori sedang hingga berat. Secara geografis terletak di pesisir laut, memiliki luas 1,12 km dan dihuni 13.890 jiwa, sehingga tingkat kepadatannya mencapai sekitar 12.400 jiwa Badan Pusat Statistik (BPS Kota Tanjungpinang, 2024). Wilayah ini dikategorikan sebagai wilayah kumuh ditandai oleh bangunan yang rapat, jalan lingkungan sempit, drainase tidak memadai, serta risiko banjir rob yang terjadi dua dan empat kali sebulan saat pasang air laut tinggi, dengan ketinggian genangan antara 30-70 cm yang berlangsung selama enam ancaman lingkungan kawasan pesisir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut pasang hingga meluap ke daratan, dan menjadi tantangan berulang yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Kondisi lingkungan yang kurang mendukung ini berdampak langsung pada aspek kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota

Tanjungpinang (2024), Kelurahan Tanjung Unggat mencatat 60 orang ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis (KEK). Penyakit yang paling sering muncul dan berulang adalah diare, infeksi saluran pernapasan akut, serta gangguan kulit, yang erat kaitannya dengan kualitas air bersih yang terbatas dan sistem sanitasi yang belum memadai. Hanya sekitar tiga puluh delapan persen rumah tangga yang terhubung ke jaringan air bersih PDAM, sedangkan sisanya masih mengandalkan sumur dangkal yang kerap tercampur air laut atau membeli air secara eceran dengan harga relatif mahal. Sebanyak empat puluh tujuh persen unit jamban keluarga juga belum memenuhi syarat kesehatan, sehingga limbah cair sering langsung dibuang ke selokan atau perairan sekitar (Dinkes Kota Tanjungpinang, 2024).

Dari sisi ekonomi dan kemiskinan, data Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang (2024), menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kecamatan Bukit Bestari mencapai kisaran sembilan sampai dua belas persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota yang berada di angka lima koma sembilan puluh enam persen. Sebagian besar warga, yaitu sekitar tujuh puluh dua persen, bekerja di sektor informal seperti buruh harian, pedagang keliling, dan nelayan, dengan pendapatan rata-rata berkisar di bawah tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah per orang per bulan sesuai batas garis kemiskinan daerah tersebut.

Kondisi ini diperparah oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, di mana hanya sekitar delapan belas persen penduduk yang tamat Sekolah Menengah Atas ke atas, sedangkan empat puluh dua persen lainnya hanya tamat Sekolah Dasar atau bahkan tidak tamat sekolah (Siregar dan Darmawan, 2022). Ketika banjir rob

terjadi, aktivitas ekonomi terhenti sementara dan pendapatan menurun drastis, sehingga mendorong warga untuk terus beradaptasi agar dapat bertahan hidup.

Kesulitan yang dialami masyarakat permukiman pelantar di Kelurahan Tanjung Unggat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap air bersih serta kondisi perekonomian masyarakat yang relatif rendah, sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Permukiman kumuh yang berada di wilayah pesisir dan bantaran sungai memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir dan genangan air karena kondisi lingkungan yang tidak didukung oleh sistem drainase dan sanitasi yang memadai. Kerentanan adalah kondisi yang menunjukkan tingkat kelemahan atau ketidakmampuan individu, masyarakat, maupun suatu sistem dalam menghadapi ancaman atau gangguan, sehingga berpotensi mengalami dampak yang merugikan. Tingkat kerentanan dipengaruhi oleh besarnya paparan terhadap bahaya, tingkat sensitivitas, serta kapasitas adaptif yang dimiliki untuk mengurangi risiko dan memulihkan diri dari dampak yang terjadi

Dalam kondisi ini, adaptasi menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan lingkungan dan sosial-ekonomi. Menurut Smit dan Wandel (2006), adaptasi merupakan proses penyesuaian yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun sistem terhadap perubahan kondisi lingkungan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan serta memanfaatkan peluang yang mungkin muncul. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi masyarakat pesisir tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan, tetapi juga oleh kapasitas sosial, ekonomi, kelembagaan, serta akses terhadap sumber daya yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

Sejalan dengan itu, Adger (2003) menjelaskan bahwa kapasitas adaptif merupakan kemampuan suatu sistem, komunitas, atau individu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan, meminimalkan kerugian, serta memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan tersebut. Dengan demikian, semakin tinggi kapasitas adaptif yang dimiliki masyarakat, semakin besar pula kemampuan mereka untuk mempertahankan kesejahteraan dan meningkatkan ketahanan permukiman dalam menghadapi berbagai tekanan lingkungan maupun perubahan iklim. Kapasitas adaptif masyarakat pesisir pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendidikan, kondisi ekonomi rumah tangga, akses terhadap informasi, keberadaan jaringan sosial, dukungan kelembagaan, serta ketersediaan infrastruktur dasar. Masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya tersebut cenderung lebih mampu mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dibandingkan masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya (Smit & Wandel, 2006).

Fokus peneliti ini ialah Kelurahan Tanjung Unggat yang terletak di kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Lokasi Kelurahan Tanjung Unggat RW 06 yang berada di pinggiran laut, dan rumah-rumah yang menumpuk menggambarkan tantana kota yang kurang di perhatikan atau di tata, belum lagi banyak sampah yang naik ke darat dan pemandangan yang kurang nyaman untuk dilihat. Secara geografis, RW 06 terletak di bagian tepi pantai, dengan ketinggian permukaan tanah berkisar antara 1,5 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar

wilayahnya berupa dataran rendah yang sangat rentan terhadap genangan air saat terjadi pasang laut tinggi (Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang, 2024).

Sejak pertengahan tahun 1990-an, wilayah ini mulai dihuni secara terus-menerus oleh pendatang dari berbagai daerah sekitar serta penduduk asli setempat. Awalnya dihuni secara berkelompok dekat pantai untuk memudahkan akses terhadap sumber penghidupan dari laut. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, pemukiman berkembang ke arah daratan tanpa perencanaan tata ruang yang teratur, sehingga terbentuklah kawasan permukiman padat dan tidak teratur seperti yang terlihat saat ini (Siregar & Darmawan, 2022).

Kawasan permukiman kumuh menjadi sumber masalah sosial. permasalahan yang sering terjadi di kelurahan Tanjung Unggat, keadaan sosial ekonomi, kekurangan air bersih dan lingkungan yang tidak bersih oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan sehingga peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai adaptasi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat RW 06.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana adaptasi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Bagaimana adaptasi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik. Baik secara efektif dan akurat. Yang menyajikan hasil yang seseui dilapangan serta memberikan pemahaman yang sesuai dan berguna bagi semua pihak. Sehingga ada manfaat secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kajian sosiologi perkotaan, sosiologi lingkungan dan dijadikan referensi untuk penelitian lain nya. Dalam memahami Bagaimana adaptasi penyesuan dilingkungan yang renta terhadap permasalahan lingkungan terhadap masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi adaptasi masyarakat yang tinggal di wilayah permukiman kumuh pesisir. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah

dalam merumuskan kebijakan penataan permukiman dan peningkatan infrastruktur dasar. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang cara mengelola lingkungan hunian secara mandiri. Sementara bagi akademisi dan pembaca umum, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk kajian lebih lanjut mengenai kerentanan sosial dan lingkungan di kawasan pesisir.

